



P E N E T A P A N
Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUHAMAD MUKSIN, lahir di Kenyalu, pada tanggal 31 Desember 1989, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kenyalu, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Register Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Pya telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Muhamad Muksin, di Kenyalu, pada tanggal 31 Desember 1989 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-07042014-0051;
2. Bahwa Pemohon pernah berangkat ke luar negeri pada tahun 2014 dan pernah membuat Paspor atas nama Sulham dengan tempat lahir di Sesaot Daye, tanggal 06 Mei 1990 yang tercatat dalam Paspor Nomor A 9482314;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data nama, tempat, tanggal lahir, dan alamat pada Paspor Pemohon yang semula tertulis Sulham, Sesaot Daye, 06 Mei 1990 menjadi Muhamad Muksin, Kenyalu, 31 Desember 1989 agar sesuai dengan KK, KTP, dan Akte Kelahiran;
4. Bahwa untuk memperbaiki data pada Paspor, Kantor Imigrasi Mataram menyatakan bahwa harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga permohonan ini diajukan;
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Pemohon bernama Muhamad Muksin, lahir di Kenyalu, pada tanggal 31 Desember 1989;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang memuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan Surat Permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Muksin dengan NIK: 5202070107830225 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 Februari 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Identitas Paspur atas nama Sulham dengan Nomor A 9482314 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 08 Desember 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202072403140004 dengan Kepala Keluarga atas nama Muhamad Muksin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 19 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Muksin dengan Nomor: 5202-LT-07042014-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 07 April 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 615/17/IX/2012 atas nama Muhamad Muksin (Suami) dan Dzaton Megataini (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 472/05/JG/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, dan P-5 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat bertanda P-6 berupa asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Arrizi

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang hendak memperbaiki kesalahan identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki Paspor dengan identitas yang tertulis atas nama Sulham, lahir di Sesaot Daye, pada tanggal 06 Mei 1990;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Muhamad Muksin, lahir di Kenyalu, pada tanggal 31 Desember 1989 sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan lain milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke luar negeri yaitu ke Negara Malaysia untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa penerbitan/pendaftaran Paspor milik Pemohon tersebut diurus oleh pihak Penyalur Tenaga Kerja Indonesia, sehingga identitas yang tertulis dalam Paspor milik Pemohon tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dzatun Megataini, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. Al Azwan Egitama dan M. Al Keyza Arsyani;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Paspor baru untuk berangkat ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Sulham, lahir di Sesaot Daye, pada tanggal 06 Mei 1990, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Pya



kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan untuk memperbaiki identitas dalam Paspor tersebut, Kantor Imigrasi mensyaratkan harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan/perbaikan identitas dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terlibat dengan permasalahan hukum apapun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Shihab Al-Fikri

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang hendak memperbaiki kesalahan identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki Paspor dengan identitas yang tertulis atas nama Sulham, lahir di Sesaot Daye, pada tanggal 06 Mei 1990;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Muhamad Muksin, lahir di Kenyalu, pada tanggal 31 Desember 1989 sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan lain milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke luar negeri yaitu ke Negara Malaysia untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa penerbitan/pendaftaran Paspor milik Pemohon tersebut diurus oleh pihak Penyalur Tenaga Kerja Indonesia, sehingga identitas yang tertulis dalam Paspor milik Pemohon tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dzatun Megataini, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. Al Azwan Egitama dan M. Al Keyza Arsyani;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Paspor baru untuk berangkat ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Sulham, lahir di Sesaot Daye, pada tanggal 06 Mei 1990, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan untuk memperbaiki identitas dalam Paspor tersebut, Kantor Imigrasi mensyaratkan harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan/perbaikan identitas dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terlibat dengan permasalahan hukum apapun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Paspor milik Pemohon atas nama Sulham dengan Nomor A 9482314 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 08 Desember 2014, yang mana dalam Paspor milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan identitas yaitu pada nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon, pada Paspor tersebut tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Sulham, lahir di Sesaot Daye, pada tanggal 06 Mei 1990 seharusnya nama Pemohon adalah Muhamad Muksin, lahir di Kenyalu, pada tanggal 31 Desember 1989 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Muhammad Arrizi dan Saksi Shihab Al-Fikri;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, dan P-5 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat bertanda P-6 berupa asli, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dari Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Muksin dengan NIK: 5202070107830225 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 Februari 2018, dan bukti surat bertanda P-3 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202072403140004 dengan Kepala Keluarga atas nama Muhamad Muksin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 19 Juli 2019, serta diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kenyalu, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Muksin dengan NIK: 5202070107830225 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 Februari 2018, dan bukti surat bertanda P-4 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Muksin dengan Nomor: 5202-LT-07042014-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 07 April 2014, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah seorang yang bernama Muhamad Muksin, lahir di Kenyalu, pada tanggal 31 Desember 1989, yang mana Pemohon merupakan anak keenam laki-laki dari Ayah yang bernama Zaenudin serta Ibu yang bernama Nurhaen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202072403140004 dengan Kepala Keluarga atas nama Muhamad Muksin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 19 Juli 2019,

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Pya



dan bukti surat bertanda P-5 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 615/17/IX/2012 atas nama Muhamad Muksin (Suami) dan Dzatun Megataini (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon atas nama Muhamad Muksin, yang lahir di Kenyalu, pada tanggal 31 Desember 1989 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dzatun Megataini, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. Al Azwan Egitama dan M. Al Keyza Arsyani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Identitas Paspor atas nama Sulham dengan Nomor A 9482314 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 08 Desember 2014, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa sebelumnya Pemohon pernah pergi ke luar negeri yaitu ke Negara Malaysia untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia dengan menggunakan Paspor Nomor A 9482314 atas nama Sulham, lahir di Sesaot Daye, pada tanggal 06 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tanggal 08 Desember 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-6 berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 472/05/JG/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Mei 2023, diperoleh fakta bahwa orang yang bernama Muhamad Muksin, lahir di Kenyalu, pada tanggal 31 Desember 1989, bertempat tinggal di Kenyalu, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang tercatat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5202070107830225 sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama Sulham, lahir di Sesaot Daye, pada tanggal 06 Mei 1990 sebagaimana tertera dalam Paspor Nomor A 9482314, akan tetapi terdapat perbedaan identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertera dalam Kartu Keluarga dengan Paspor, dan identitas yang akan digunakan oleh Pemohon adalah sesuai dengan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon dengan nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertera pada dokumen administrasi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Pya



kependudukan lain milik Pemohon, dalam Paspor milik Pemohon Nomor A 9482314 tertulis nama Pemohon adalah Sulham, lahir di Sesaot Daye, pada tanggal 06 Mei 1990, sedangkan pada dokumen administrasi kependudukan lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Muhamad Muksin, lahir di Kenyalu, pada tanggal 31 Desember 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon berupa nama, tempat, dan tanggal lahir yang tercantum dalam Paspor Nomor A 9482314 tersebut yang tertulis atas nama Pemohon Sulham, lahir di Sesaot Daye, pada tanggal 06 Mei 1990 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Muhamad Muksin, lahir di Kenyalu, pada tanggal 31 Desember 1989, dan oleh karena terdapat perbedaan antara nama, tanggal, dan bulan lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon dengan nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon tersebut harus dilakukan perubahan dan perbaikan agar sesuai dengan nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, yang mana pada Paspor milik Pemohon semula tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Sulham, lahir di Sesaot Daye, pada tanggal 06 Mei 1990 diubah menjadi atas nama Muhamad Muksin, lahir di Kenyalu, pada tanggal 31 Desember 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan/Hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan bahwa:

(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Pya



(2) *Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:*

- a. Pengajuan permohonan;*
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan*
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai perubahan identitas/data diri yang termuat dalam Paspor milik Pemohon merupakan kewenangan dari Pejabat Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan *“Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”*;

Menimbang, bahwa perubahan dan penyesuaian identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon tersebut setelah ditanyakan kepada Pemohon dan diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi bukanlah bertujuan untuk mengaburkan identitas Pemohon karena keterlibatan Pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum, namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan Pemohon, serta tidak ada pula pihak yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah dan memperbaiki identitas berupa nama, tempat, dan tanggal lahir pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus penerbitan Paspor baru untuk berangkat ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Sulham, lahir di Sesaot Daye, pada tanggal 06 Mei 1990, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sebagaimana yang dimaksud dalam petitum

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Pya



permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **Muhamad Muksin**, lahir di **Kenyalu**, pada tanggal **31 Desember 1989** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-07042014-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 07 April 2014;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas dalam Paspor Nomor A 9482314 milik Pemohon yang tertulis atas nama Sulham, lahir di Sesaot Daye, pada tanggal 06 Mei 1990 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama Muhamad Muksin, lahir di Kenyalu, pada tanggal 31 Desember 1989, untuk selanjutnya diajukan kepada Kantor Imigrasi Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 oleh Maulida Ariyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Johan Azis, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Pemohon, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JOHAN AZIS, S.H.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Pya



Perincian biaya perkara 139/Pdt.P/2023/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)			